



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 188.45/ 47 /KUM/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun pedoman penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



Tembusan:  
Inspektur Daerah Kab. HSS di Kandangan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 188.45/ 47 /KUM/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB / PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET	
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	<b>Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya</b>						
		1	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	Indeks	Menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak . IPM = (akar pangkat 3 dari (Indeks kesehatan x indeks pendidikan x indeks pengeluaran)) x 100  $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$			
		2	Harapan lama sekolah	Tahun	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ I = Indeks HLS = Harapan Lama Sekolah min = angka minimal maks = angka maksimum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Pusat Statistik	
3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ I = Indeks RLS = Rata-Rata Lama Sekolah min = angka minimal maks = angka maksimum	Badan Pusat Statistik				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	Tahun	Rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu.  $\frac{\text{penjumlahan usia yang meninggal tahun itu}}{\text{jumlah orang yang meninggal tahun itu}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan		
3	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	5	PPH Ketersediaan	Skor	Skor PPH Ketersediaan dihitung berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di dalam Neraca Bahan Makanan (NBM) disajikan angka rata-rata jumlah jenis Bahan Makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita pertahun dalam kilogram serta per kapita per hari dalam satuan gram, pada kurun waktu tertentu.	Dinas Ketahanan Pangan		
4	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	6	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	Persen	$\frac{\sum \text{Jumlah SPM yang terpenuhi}}{\sum \text{SPM perangkat daerah di kab. HSS}} \times 100\%$	Disdikbud/Dinkes/Dissos/Satpol-PP-Damkar/BPBD/Dis.PUTR/DisperakPLH	Laporan SPM	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET	
		<b>Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal</b>						
5	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	7 <b>Tingkat kemiskinan</b>	Persen	Persentase penduduk miskin ( persentase penduduk di bawah garis kemiskinan)	Dinas Sosial	Badan Pusat Statistik		
		8 Indeks Gini	Indeks	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>Dimana :                      Pi = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i                      Qi = Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i                      Nilai gini rasio berkisar antara 0 dan 1, jika :                      G &lt; 0,3 = ketimpangan rendah                      0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang                      G &gt; 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Badan Pusat Statistik		
6	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	9 Tingkat pengangguran terbuka	Persen	$\frac{\sum \text{Penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\sum \text{Penduduk angkatan kerja}} \times 100$		Badan Pusat Statistik		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET	
7	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	10	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang tertentu $\frac{\text{PDRB}(t) - \text{PDRB}(t-1)}{\text{PDRB}(t-1)} \times 100\%$ ket : t = tahun berjalan t-1 = tahun sebelumnya tahun t			
		11	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	Persen	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori industri pengolahan tahun } N - \sum \text{Nilai tambah kategori industri pengolahan tahun } (N-1)}{\sum \text{Nilai tambah kategori pengolahan tahun } (N-1)} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Badan Pusat Statistik	
		12	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (tahun } N) - \sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Tahun } (N-1)}{\sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Tahun } (N-1)} \times 100\%$	Dinas Perdagangan	Badan Pusat Statistik	
		13	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun } N - \sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun } (N-1)}{\sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun } (N-1)} \times 100\%$	Dinas Pertanian/ Dinas Perikanan	Badan Pusat Statistik	
8	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14	Persentase peningkatan retribusi dan pajak daerah	Persen	$\Sigma \text{Retribusi dan Pajak Daerah Thn } N$	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET	
9	Meningkatnya investasi PMDN	15 Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Persen	$\frac{\sum \text{nilai PMDN Tahun } N - \sum \text{nilai PMDN Tahun } (N - 1)}{\sum \text{nilai PMDN Tahun } (N - 1)} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan PMDN		
10	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	16 Tingkat Pengeluaran Wisatawan ( <i>Spending of money</i> )	Nilai (Rp)	Dihitung berdasarkan akumulasi jumlah pengeluaran wisatawan untuk konsumsi akhir dan transfer sosial bekerjasama dengan dinas / instansi / stakeholders terkait dan perhitungan akhir yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik Kab. HSS	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Laporan kunjungan wisatawan		
11	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	<b>Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian</b>						
		17	<b>Persentase infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas</b>	<b>Persen</b>				
		18	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan $\geq 40$ Km/jam	Persen	$\frac{\sum \text{Panjang jalan kondisi mantap}}{\text{total jumlah panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET
		19	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	Persen	$\frac{\sum \text{ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam}}{\sum \text{ketersediaan air irigasi seluruh hektar}} \times 100\%$		
		20	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	Persen	$\frac{\sum \text{Sarana dan prasarana publik yang terbangun}}{\sum \text{sarana dan prasarana publik yang dibutuhkan}} \times 100\%$		
		21	Persentase kecukupan RTH publik	Persen	$\frac{\sum \text{RTH publik yang terbangun}}{\sum \text{RTH publik yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	
		22	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Persen	$\frac{\text{Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas}}{\text{Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang ada}} \times 100\%$	Pemukiman dan Lingkungan Hidup	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET	
<p><b>Misi 4 : Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan</b></p>								
12	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok	23 Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	$IDM = \frac{\sum IDM \text{ se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}}$ $\sum IDM \text{ se Kab.HSS} : \text{Jumlah IDM Desa se Kab.HSS}$ $\sum \text{Desa se Kab.HSS} : \text{Jumlah Desa}$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
13	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	<p>IPG :</p> <p>1) Umur panjang dan sehat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. indikator angka harapan hidup perempuan</li> <li>2. indeks dimensi : indeks harapan hidup perempuan</li> <li>3. indeks sebaran merata : indeks / harapan hidup dengan sebaran merata</li> </ol> <p>2) Pengetahuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. indikator AMH perempuan, MYS perempuan</li> <li>2. Indeks dimensi : indeks pendidikan perempuan</li> <li>3. Indeks sebaran merata : indeks pendidikan dengan sebaran merata</li> </ol> <p>3) Kehidupan yang layak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator perkiraan pendapatan perempuan</li> <li>2. Indeks dimensi : indeks pendapatan perempuan</li> <li>3. Indeks sebaran merata : indeks dengan pendapatan sebaran merata</li> </ol>	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		25	Persentase desa/kelurahan layak anak	Persen	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan layak anak}}{\text{Jumlah desa/kelurahan yang ada}} \times 100$			
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	26	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	<p>IKLH dibentuk oleh komponen IKU + IKA + IKTL</p> <p>* IKU = Indeks Kualitas Udara</p> <p>* IKA = Indeks Kualitas Air</p> <p>* IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup		
<p><b>Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis</b></p>								

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET
15	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	27 <i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	<i>Indeks</i>	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%			
		28 Predikat AKIP	Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Bagian Organisasi /Inspektorat Daerah/ Seluruh SKPD/ Bappelitbangda	LHE AKIP	

00054

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET
		29 Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Predikat	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri dari 6 aspek penilaian yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.	Setda (Bagian Organisasi) /Dukcapil/ Dinkes/ RSUD Brigiend H. Hasan Basry Kandangan/RS UD Daha Sejahtera/DisP MPTSP	LHE PELAYANAN PUBLIK	
16	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	30 Opini WTP BPK terhadap LKPD	Predikat	Hasil Audit BPK RI yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah, penyajian laporan keuangan, meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, penguatan dan pengendalian internal di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Inspektorat Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
		31 Indeks profesionalisme ASN	Indeks	Indeks Profesionalitas ASN merupakan salah satu cara mengukur profesionalisme ASN. Pengukuran dihitung dari data-data : SAPK, E-PUPNS, Sistem Informasi Kepegawaian, Daftar Gaji dan Tunjangan ASN, sasaran kerja pegawai dan pegawai yang terkena hukuman.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
17	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	32 Persentase perangkat daerah yang mengimplemen-tasikan teknologi informasi dengan baik	Persen	$\frac{\sum \text{Perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik}}{\sum \text{Perangkat daerah Se - Kab. HSS}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informasi		

D	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB / PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET
		33 Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	Persen	$\frac{\sum \text{Desa yang menggunakan aplikasi TI}}{\sum \text{Desa Se - Kab. HSS}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY